



Judul : Ayo, percepat produksi vaksin dalam negeri
Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Permintaan Komisi IX Ayo, Percepat Produksi Vaksin Dalam Negeri

ANGGOTA Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem Ratu Wula berharap, penanggulangan Covid-19 dilaksanakan secara tepat dan terukur. Karenanya, target waktu vaksinasi selama 18 bulan harus diiringi ketersediaan vaksin Covid-19.

Pengembangan vaksin buatan dalam negeri, misalnya vaksin Merah Putih, akan memenuhi kebutuhan tersebut.

“Soal vaksinasi, target pemerintah sudah jelas. Waktu 18 bulan itu sebentar. Idealnya, kita mempercepat vaksin buatan sendiri, agar proses vaksinasi berlangsung secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Ratu di Jakarta, kemarin.

Dia menguraikan, pengembangan vaksin Merah Putih juga merespons pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, soal tidak sesuainya target kedatangan vaksin.

Sebab, kasus Covid-19 di Negeri Hindustan meluas. Ini membuat Pemerintah India melarang pengiriman vaksin AstraZeneca ke WHO (World Health Organization) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI). Sehingga Indonesia tidak bisa mendapat bagian dari vaksin tersebut.

“Bulan April 2021, ada potensi kendala pasokan vaksin. Kita hanya memiliki 7 juta dosis vaksin, menyusut dari

target semula 15 juta dosis vaksin. Ini momentum Indonesia mempercepat produksi vaksin dalam negeri agar tidak ada kendala stok di lapangan,” jelas dia.

Namun begitu, sambung dia, pengembangan vaksin tetap membutuhkan kehati-hatian, dan berpedoman pada protokol WHO. Selain itu, vaksin tersebut juga harus memenuhi semua syarat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebelum digunakan untuk masyarakat.

Pengembangan obat dan vaksin merupakan salah satu proses yang paling teregulasi di dunia. Sebab, menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia.

“Kita harus mengikuti secara ketat, proses dan prosedur yang sudah ditentukan,” tegas Legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 itu.

Berdasar informasi terbaru, lanjut dia, BPOM belum mengeluarkan izin persetujuan penelitian uji klinis (PPUK), lantaran berbagai pertimbangan klinis. Karena itu, dirinya mengajak seluruh pihak terkait bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jika regulasi standar klinis ada yang kurang (tidak terpenuhi), mari diperbaiki dan diselesaikan dengan cepat, tepat, serta terukur,” tandasnya. ■ ONI

